

Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress Dengan Penerapan Sistem Whistleblowing Sebagai Variabel Moderasi

Vicky Febriana, Yulius Jogi Christiawan*

Accounting Department, Petra Christian University, Jalan Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, Indonesia

*Coressponding author; Email: yulius@petra.ac.id

ABSTRAK

Setiap perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda. Ada yang masuk ke dalam zona aman, ada juga yang masuk ke dalam zona tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti apakah dengan adanya penerapan sistem *whistleblowing* dapat memperkuat hubungan antara karakteristik komite audit terhadap *financial distress*. Penelitian ini dilakukan pada 90 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam periode 2015 hingga 2019. Di dalam penelitian ini, *financial distress* diukur dengan menggunakan *Altman Z-Score* dan penerapan sistem *whistleblowing* menggunakan *dummy*. Sedangkan variabel ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit menggunakan data laporan keuangan perusahaan. Pengujian yang dilakukan peneliti pada penelitian ini menggunakan *Weighted Least Square* (WLS), namun penelitian ini tidak berhasil membuktikan penerapan sistem *whistleblowing* memperkuat hubungan antara independensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap *financial distress*.

Keywords: Komite audit, *financial distress*, penerapan sistem *whistleblowing*

ABSTRACT

Every company has a different financial condition. Some are in a safe zone and some are in difficult zone. This study aimed to examine the implementation of the whistleblowing system can strengthen the relationship between the characteristics of audit committee on financial distress. The study was conducted on 90 companies from manufacturing sector which were listed in the Indonesia Stock Exchange in the period of 2015 to 2019. This study measured financial distress by using the Altman Z-Score model and dummy to measure the implementation of whistleblowing system. The size of audit committee, Independence of audit committee, and frequency of audit committee meetings using the company's financial report. This test conducted by using Weighted Least Square method, but this study did not succeed in proving the implementation of the whistleblowing system strengthen the relationship between the independence of audit committee and frequency of audit committee meetings on financial distress.

Keywords: Audit committee, *financial distress*, whistleblowing system

PENDAHULUAN

Kondisi keuangan perusahaan yang berbeda-beda dipengaruhi oleh pengelolaan dana yang dilaksanakan oleh manajemen. Lingkungan usaha suatu perusahaan terdiri atas lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum terdiri dari politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, dan demografi. Sedangkan lingkungan khusus terdiri dari *supplier*, pelanggan, pesaing, teknologi, dan sosio politik. Lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Ketika

perusahaan mengalami penurunan keuangan yang mengarah pada kebangkrutan, dapat dikatakan perusahaan tersebut mengalami *financial distress* (Widarjo & Setiawan, 2009).

Kondisi *financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi keuangan yang menurun dan mengarah kepada kebangkrutan (Mas'ud & Srengga, 2012). Kondisi *financial distress* biasanya ditandai dengan pengiriman barang yang tertunda, penurunan kualitas produk, serta pembayaran tagihan dari bank yang tertunda (Platt & Platt, 2002). Ketika suatu perusahaan terdeterksi mengalami *financial*

distress, diharapkan perusahaan dapat segera melakukan tindakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tindakan untuk segera memperbaiki bisa dilakukan jika perusahaan memiliki tata kelola yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance*.

Pembentukan komite audit dalam suatu perusahaan public harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Pembentukan komite audit diwajibkan untuk perusahaan terbuka berdasarkan surat edaran No.SE 03/PM/2000 dari Bapepam. Dalam surat tersebut, tugas dari komite audit yaitu memberikan masukan yang profesional dan independent agar kualitas kinerja meningkat dan menurunkan penyimpangan pengelolaan perusahaan sehingga membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya. Komite audit yang efektif dapat diukur melalui karakteristik komite audit. Karakteristik tersebut diantaranya yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi rapat komite audit.

Penelitian ini menerapkan sistem *whistleblowing* sebagai variabel moderasi dikarenakan ketika sistem *whistleblowing* diterapkan, maka komite audit akan lebih efektif dalam mengawasi perusahaan (Lee & Fargher, 2013). Penerapan sistem *whistleblowing* penting untuk pencegahan praktek illegal yang biasanya terjadi di dalam bisnis perusahaan dan memiliki dampak untuk lingkungan sekitarnya (Ahmad, 2014). Peneliti lainnya juga menyatakan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* merupakan salah satu bagian terpenting dalam akuntansi serta merupakan cara untuk pencegahan tindakan tidak bermoral terutama dalam penyajian laporan keuangan (Zakaria, 2015). Penerapan Sistem *whistleblowing* dalam suatu perusahaan akan membantu mengidentifikasi kondisi *financial distress* secara lebih cepat, sehingga perusahaan dapat segera melakukan tindakan untuk mencegah *financial distress* (Utami, Handajani & Hermanto, 2019).

Agency Theory

Dalam teori agensi terdapat suatu relasi antara *principal* (pemilik perusahaan) dengan *agent* (pihak management), dimana *principal* mempekerjakan *agent* untuk menjalankan tugas-tugas, tanggung jawab dan mengelola suatu perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disetujui bersama (Jensen & Meckling, 1976). Biasanya organisasi memiliki pemegang saham atau pemilik perusahaan yang berperan sebagai

principal dan bertugas untuk menyiapkan dana beserta sarana untuk berjalannya suatu perusahaan. Sedangkan manajemen sebagai *agent* bertugas dalam mengurus perusahaan agar keuntungan dapat meningkat sehingga tidak terjadi *financial distress* (Elyanto, 2013). Seorang *agent* mempunyai informasi perusahaan yang lebih banyak dibandingkan dengan *principal*, karena *agent* memiliki tugas untuk mengoperasikan kegiatan di perusahaan. Permasalahan timbul ketika keinginan *agent* bertolak belakang dengan keinginan *principal*. Ketika *agent* memiliki tujuan untuk mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut akan mengakibatkan kerugian keuangan bahkan menyebabkan kondisi *financial distress* pada suatu perusahaan.

Corporate governance memiliki hubungan yang erat dengan *agency theory* (Mustapha & Ahmad, 2011). Adanya hubungan erat ini dikarenakan *agency theory* merupakan suatu fondasi untuk memahami *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* pada perusahaan mampu meningkatkan fungsi *monitoring* dan control terhadap laporan keuangan dan kinerja manajemen. Salah satu bagian dari *corporate governance* yaitu komite audit. Komite audit berfungsi untuk memastikan *agent* agar tetap menjalankan fungsi *agent*-nya sesuai dengan keinginan *principal* sehingga mampu mengurangi terjadinya *financial distress* pada perusahaan.

Theory of Planned Behaviour

Theory of planned behavior mengungkapkan bahwa terdapat niat dari dalam individu sebelum individu melakukan suatu kegiatan. Terdapat tiga faktor yang menentukan niat yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioural control* (Ajzen, 2006). *Attitude toward the behavior* yaitu ketika individu merasa bahwa apa yang dilakukan menghasilkan keuntungan bagi dirinya, maka individu tersebut cenderung akan mengulangi perilaku yang sama. Tetapi jika perilaku dari individu tersebut menghasilkan kerugian bagi dirinya, maka individu tersebut cenderung untuk tidak mengulangi perilaku yang sama (Ajzen, 2005). *Subjective norm* merupakan perilaku yang berdasarkan kondisi lingkungan sekitar. *Perceived behavioral control* adalah persepsi individu yang memiliki banyak faktor pendukung dalam melakukan tindakan (Ajzen, 1991).

Financial Distress

Menurut Platt (2002) dalam Atmini dan Wuryana (2005), *financial distress* merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami penurunan keuangan sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Parameter kondisi *financial distress* seperti pengiriman yang tertunda, penurunan kualitas produk, serta pembayaran tagihan bank yang tertunda. Kondisi *financial distress* yang diketahui lebih cepat, akan membantu perusahaan untuk terhindar dari kebangkrutan atau likuidasi. Ketika organisasi tidak mampu menjaga kestabilan keuangan, maka dari sanalah akan terjadi kondisi *financial distress* yang diawali dengan kerugian perusahaan (Rayendra, 2007 dalam Andre, 2013). Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat dilihat dari laba bersih selama lebih dari setahun menunjukkan angka negatif, serta tidak membayar dividen (Almilia & Kristijadi, 2003). Dalam penelitian ini, prediksi terjadinya *financial distress* diukur dengan penghitungan *Altman Z-Score* dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = 1,2 \times \frac{\text{Working Capital}}{\text{Total Assets}} + 1,4 \times \frac{\text{Retained Earnings}}{\text{Total Assets}} + 3,3 \times \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Assets}} + 0,6 \times \frac{\text{Market Value Equity}}{\text{Book Value of Debt}} + 1,0 \times \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

Dimana:

$Z < 1,23$ = perusahaan masuk dalam zona *distress*

$1,23 < Z < 2,9$ = perusahaan masuk dalam zona *grey area* atau rawan

$Z > 2,9$ = perusahaan masuk dalam zona aman

Komite Audit

Menurut Widyati (2013) komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris bertujuan dalam membantu dan menguatkan fungsi dewan komisari saat mengerjakan tugasnya yaitu sebagai pengawas yang bekerja secara independent dan profesional. Berdasarkan peraturan OJK No.55/POJK.04/2015, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu pelaksanaan tugas dewan komisaris. Berdasarkan kajian penelitian yang sudah dilakukan, komite audit memiliki beberapa karakteristik yang selama ini diteliti, yaitu *size* (jumlah komite audit), frekuensi rapat (jumlah pertemuan) dan *independence* (independensi anggota).

Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit pada penelitian ini ialah jumlah total anggota pada satu tim komite audit suatu perusahaan. Soliman & Ragab (2014) memperkirakan bahwa jumlah anggota yang besar mampu memberikan kekuatan yang dibutuhkan dan mampu memberikan keberagaman pandangan dan keahlian untuk memastikan keefektifan pengawasan. Hal ini dikarenakan setiap anggota bisa memiliki cara pandang yang berbeda-beda dan memiliki keahlian masing-masing di bidang yang dikuasainya. Setiap anggota juga dipercaya mampu saling melengkapi kekurangan antar anggota sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh setiap anggota. Ukuran komite audit sudah diatur dalam peraturan untuk memastikan jumlah minimum komite audit dalam suatu perusahaan.

Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit dengan cara:

$\sum \text{ACSIZE}_{it}$ = Jumlah anggota komite audit

Frekuensi Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit mampu menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite audit. Menurut Saleh, Iskandar & Rahmat (2007) apabila frekuensi rapat yang diadakan komite audit semakin banyak, maka fungsi pengawasan komite audit semakin meningkat. Komite audit yang rutin melakukan pertemuan secara teratur mampu memastikan pihak manajemen telah melaporkan proses keuangan dengan baik. Rapat yang diadakan oleh suatu komite audit diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Penelitian ini mengukur variabel rapat komite audit menggunakan cara:

$\sum \text{ACMEETING}_{it}$ = Jumlah rapat komite audit selama satu tahun

Independensi Komite Audit

Independensi komite audit merupakan komite audit yang tidak terikat atau memihak dengan pihak manapun, berdiri sendiri, dan mandiri. Komite audit tidak boleh terikat atau memiliki hubungan usaha dengan perusahaan dan tidak boleh terikat dengan perusahaan jasa konsultasi yang menawarkan jasa dalam bidang keuangan dan hukum. Komite audit

harus bersifat independent agar mampu memberikan atau menghasilkan keputusan-keputusan atau laporan-laporan yang bersifat objektif dan jujur. Menurut Soliman & Ragab (2014); Juhmani (2016), komite audit yang independent mampu menghasilkan tingkat pengawasan yang lebih efektif terhadap pihak manajemen.

Penelitian ini mengukur tingkat independensi komite audit dengan cara:

$$\sum ACIDP_{it} = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota Komite Audit Independen}}{\sum \text{Jumlah Anggota Komite Audit}}$$

Penerapan Sistem *Whistleblowing*

Whistleblowing merupakan pelaporan dari dalam perusahaan yang menjalankan praktik illegal, tidak bermoral atau tidak sah yang dikendalikan oleh pihak luar (Miceli & Near, 1985). *Whistleblowing* juga diartikan dengan peringatan kepada *top management* atau luar perusahaan tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh organisasi (Ahern & McDonald, 2002; Putri, 2016). Kesalahan yang disembunyikan organisasi dapat diungkap dengan melalui *whistleblowing* internal atau eksternal. Ketika karyawan mengetahui kecurangan yang ada di dalam perusahaan, lalu karyawan tersebut melaporkan kepada atasannya, maka itu yang dinamakan *whistleblowing internal*. Sedangkan saat karyawan mengetahui kecurangan di dalam perusahaan lalu melaporkan kepada pihak luar perusahaan, maka hal tersebut dinamakan *whistleblowing external* (Elias, 2008). Dengan adanya penerapan sistem *whistleblowing* di dalam suatu perusahaan, diharapkan auditor dapat segera mendeteksi adanya *fraud* dan segera memperbaikinya agar tidak terjadi *financial distress*.

Dalam penelitian ini, pengukuran sistem *whistleblowing* menggunakan *dummy variable*, 1 jika perusahaan menerapkan sistem *whistleblowing*, dan 0 jika perusahaan tidak menerapkan sistem *whistleblowing*.

Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Sesuai dengan *agency theory*, untuk membentuk komite audit agar efektif, maka jumlah komite audit harus memadai untuk

menjalankan tugasnya. Di Indonesia, komite audit dikatakan efektif juga memiliki minimal tiga orang anggota dengan komisaris independent sebagai ketua. Jumlah anggota komite audit minimal lebih dari satu orang bertujuan agar komite audit dapat melaksanakan pertemuan dan saling bertukar pendapat (KNKG, 2002).

Menurut Pierce dan Zahra (1992) dalam teori ketergantungan sumber daya menyatakan bahwa jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite berkaitan dengan efektivitas pengawasan komite audit. Ketika ukuran komite meningkat, maka efektivitas komite audit juga meningkat, karena permasalahan yang ada di perusahaan dapat segera terselesaikan dengan pemikiran-pemikiran dari anggota komite audit. Diharapkan komite audit yang efektif dapat memberikan keputusan dalam hal keuangan perusahaan sehingga perusahaan terhindar dari kesulitan keuangan (Rahmat et al, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut dan melalui penelitian-penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka kemungkinan terjadinya *financial distress* semakin kecil.

H1: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Berdasarkan *agency theory*, anggota independent dapat menurunkan permasalahan serta menghubungkan kepentingan antara pemilik dengan manajemen. Anggota independent merupakan pengawas yang baik karena dianggap lebih objektif dan kritis dalam menjalankan tugasnya, karena tidak terikat oleh pihak manapun. Karena hal tersebut, *financial distress* dapat dihindari. Berdasarkan peraturan BEI, komite audit minimal terdiri atas tiga anggota yang sebagian besar independent, minimal satu pejabat komisaris independent, serta minimal pejabat lainnya berasal dari pihak eksternal perusahaan. Tujuan dari independensi yaitu untuk menjaga integritas dan objektif dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak timbul permasalahan lain (FCGI, 2002).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Revitasari, Nurdin & Azib (2017), menunjukkan adanya hubungan negatif antara independensi komite audit dengan *financial distress*. Hubungan negatif yang dimaksud dalam penelitian tersebut ialah independensi anggota komite audit mampu mengurangi kondisi *financial distress* pada perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dan melalui penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit yang independen, maka semakin kecil *financial distress* terjadi dalam sebuah perusahaan.

H2: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap *Financial Distress*

Menurut *agency theory*, salah satu bagian dalam *Good Corporate Governance* adalah pengawasan. Saat melaksanakan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal membutuhkan pertemuan secara teratur. Ketika komite audit melakukan pertemuan secara teratur, maka hal tersebut akan membuat komite audit semakin maksimal dalam memeriksa sistem pengendalian internal perusahaan (McMullen & Raghunandan, 1996) dalam Rahmat et al. (2008). Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengatakan bahwa komite audit wajib untuk melaksanakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Ketua komite bertugas untuk mengontrol apakah pertemuan tersebut telah terstruktur dengan jelas atau tidak.

Hasil penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) menyatakan bahwa ketika komite audit sering mengadakan rapat, rata-rata perusahaan tersebut tidak mengalami kondisi *financial distress* (Rahmat et al., 2008). Hubungan negatif ini menjelaskan bahwa semakin sering komite audit melakukan rapat akan menurunkan kemungkinan terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas dan melalui penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa semakin sering komite audit melakukan pertemuan, maka semakin

kecil *financial distress* terjadi dalam suatu perusahaan

H3: Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

Pengaruh Penerapan Sistem *Whistleblowing* Terhadap Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit Dengan *Financial Distress*

Keberhasilan dari penerapan sistem *whistleblowing* sangat bergantung pada efektivitas dari komite audit. Hal ini disebabkan karena sistem tersebut berada di bawah tanggung jawab komite audit (KNKG, 2008). Sistem *whistleblowing* yang berada di bawah kepemimpinan komite audit diharapkan dapat membantu tugas komite audit. Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2014) penerapan sistem *whistleblowing* terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan melalui penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* di perusahaan dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi resiko *fraud* secara lebih cepat dan tepat melalui laporan yang masuk dari sistem *whistleblowing* sehingga mengurangi resiko terjadinya *financial distress*. Sehingga diharapkan penerapan sistem *whistleblowing* dapat memperkuat variabel karakteristik komite audit terhadap *financial distress*.

H4: Penerapan sistem *whistleblowing* dapat memperkuat hubungan antara karakteristik komite audit dengan *financial distress*.

METODOLOGI PENELITIAN

Model Analisis

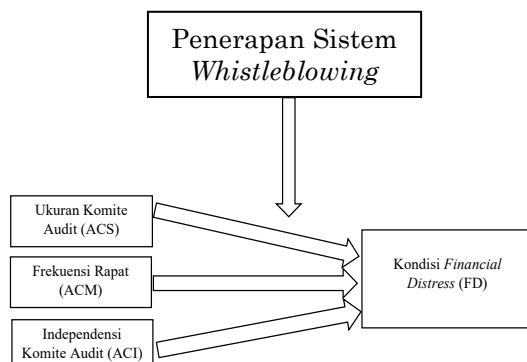
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress* dengan penerapan sistem *whistleblowing* sebagai variabel moderasi. *Financial distress* diukur dengan menggunakan rumus *Altman Z-Score*. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder dimana dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan *Bloomberg*.

Populasi yang akan diteliti merupakan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2015-2019. Terdapat 125 perusahaan yang menjadi populasi penelitian.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan memiliki data lengkap dalam 5 tahun terakhir, karena peneliti menggunakan tipe data *balanced panel*. Total sampel penelitian ini adalah 90 perusahaan dalam periode 5 tahun. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan regresi linear berganda (*multiple linear regression*). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software* bernama GRET (Gnu Regression, Econometrics, and Time-Series Library).

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Berdasarkan model analisis di atas, peneliti membentuk model persamaan sebagai berikut:

$$FD_{it} = \alpha_0 + \beta_1 ACS_{it} + \beta_2 ACI_{it} + \beta_3 ACM_{it} + \beta_4 ACS_{it} * WBS_{it} + \beta_5 ACI_{it} * WBS_{it} + \beta_6 ACM_{it} * WBS_{it} + e$$

Keterangan

FD_{it} = *Financial Distress* pada perusahaan (i) dan pada tahun (t)

ACS_{it} = ukuran komite audit pada perusahaan (i) dan pada tahun (t)

ACM_{it} = jumlah rapat komite audit pada perusahaan (i) dan pada tahun (t)

ACI_{it} = jumlah komite audit yang tidak terikat

perusahaan pada perusahaan (i) dan pada tahun (t)

WBS_{it} = whistleblowing system perusahaan (i)

α_0 = regresi linear konstan.

β_1-6 = koefisien regresi setiap variabel.

e = error.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1 Rincian Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada BEI 2015-2019	125
Perusahaan tidak memiliki data lengkap 5 tahun terakhir	35
Sampel perusahaan yang digunakan	90
Jumlah tahun pengamatan	5
Total sampel penelitian	450

Tabel di atas menunjukkan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

	N	Mean	Min	Max	Std. Deviasi
FD	450	3.02	-17.38	10.17	2.78
ACS	450	3.07	2	5	0.36
ACM	450	6.53	2	46	5.01
ACI	450	0.52	0.2	1	0.17
FD					
-Ada WBS	311	3.11	-0.84	8.31	4.42
-Tidak ada WBS	139	2.81	-17.38	10.17	4.42
ACS WBS	450	2.14	0	5	1.47
ACS					
-Ada WBS	311	3.1	2	5	0.39
ACM WBS	450	4.71	0	38	5.2
ACM					
-Ada WBS	311	5.31	3	28	3.92
ACI WBS	450	0.36	0	0.8	0.27

Dari data pada tabel 4.2 bahwa rata-rata *financial distress* (FD) perusahaan adalah 3.02, yang berarti rata-rata perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*. Nilai terendah adalah -17.38 yang berarti perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Nilai tertinggi adalah 10.17 yang

berarti perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*.

Dari data pada tabel 4.2 bahwa rata-rata ukuran komite audit (ACS) perusahaan adalah 3.07, yang berarti rata-rata jumlah anggota komite audit perusahaan adalah 3 orang. Nilai terendah adalah 2, berarti jumlah paling sedikit anggota komite audit perusahaan adalah 2 orang. Nilai tertinggi adalah 5, berarti jumlah paling banyak anggota komite audit perusahaan adalah 5 orang.

Dari data pada tabel 4.2 bahwa rata-rata frekuensi rapat perusahaan (ACM) adalah 6.53, yang berarti rata-rata jumlah rapat paling sedikit diadakan sebanyak 6 kali dalam satu tahun. Nilai terendah adalah 2, berarti jumlah rapat paling sedikit yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Nilai tertinggi adalah 46, berarti jumlah rapat terbanyak yang dilakukan suatu perusahaan sebanyak 46 kali dalam setahun.

Dari data pada tabel 4.2 bahwa rata-rata independensi komite audit (ACI) perusahaan adalah 0.52, berarti rata-rata 52% anggota komite audit adalah anggota yang independent. Nilai terendah adalah 0.2 yang berarti hanya 20% anggota komite audit adalah anggota yang independen dalam suatu perusahaan. Nilai tertinggi adalah 1, yang berarti semua anggota komite audit adalah anggota yang independen.

Dari data pada 4.2 bahwa rata-rata *financial distress* (FD) saat perusahaan menerapkan sistem *whistleblowing* adalah 3.11, berarti rata-rata perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*. Nilai terendah adalah -0.84 yang berarti perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Nilai tertinggi adalah 8.31 yang berarti perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*.

Dari data pada 4.2 bahwa rata-rata *financial distress* (FD) saat perusahaan tidak menerapkan sistem *whistleblowing* adalah 2.81, berarti rata-rata perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Nilai terendah adalah -17.38 yang berarti perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Nilai tertinggi adalah 10.17 yang berarti perusahaan tidak mengalami kondisi *financial distress*.

Dapat dilihat dari tabel 4.2 bahwa rata-rata ukuran komite audit (ACS) saat perusahaan menerapkan sistem *whistleblowing* adalah 3.1, berarti rata-rata jumlah komite audit adalah 3 orang. Nilai terendah adalah 2, berarti jumlah paling sedikit anggota komite audit perusahaan adalah 2 orang. Nilai tertinggi adalah 5, berarti jumlah paling banyak anggota komite audit perusahaan adalah 5 orang.

Selanjutnya, peneliti melakukan *Panel Diagnostic Test* untuk memilih model terbaik dengan menggunakan software GRETL. Berikut merupakan hasil Panel Diagnostic Test:

Tabel 4.3 Hasil Panel Diagnostic Test

	<i>P-value</i>
Uji Chow	0.47021
Uji Hausman	0.161731
Uji Breusch-Pagan	6.16816e-168

Sumber: Hasil Output GRETL

Dalam *panel diagnostic test*, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih model estimasi terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dengan *Fixed Effect Model* (FEM) menggunakan Uji *Chow*. Hasil pengujian Uji *Chow* pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa *p-value* Uji *Chow* sebesar 0.47021 yang menandakan bahwa nilai tersebut dibawah nilai signifikansi. Dengan demikian model terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM).

Kemudian, langkah kedua yang harus dilakukan adalah melakukan Uji *Breusch-Pagan*. Uji *Breusch Pagan* bertujuan untuk memilih antara *random effect model* atau *common effect model*. Berdasarkan tabel 4.3 nilai *breusch pagan* adalah sebesar 6.16816e-168, berarti menggunakan *random effect model* (REM).

Langkah ketiga yang dilakukan adalah melakukan uji Hausman. Berdasarkan tabel 4.3 nilai Hausman adalah 0.161731 yang berarti menggunakan *random effect model* (REM).

Dari hasil uji di atas, dapat disimpulkan bahwa dua hasil diantaranya menunjukkan bahwa model ini merupakan *Random Effect Model* (REM), sehingga peneliti mengambil keputusan bahwa *Random Effect*

Model (REM) merupakan model estimasi terbaik yang akan digunakan dalam proses uji hipotesis

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan uji heteroskedastisitas diperoleh nilai p-value sebesar 1.45012e-007. Hal ini menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses lebih lanjut menggunakan metode *Weighted Least Square* (WLS). Setelah menggunakan metode ini, model regresi sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hipotesis

Berikut merupakan hasil dari model regresi yang dilakukan:

Tabel 4.5 Hasil Uji Hipotesis (*Weighted Least Square*)

	<i>Coefficien</i> <i>t</i>	<i>t-</i> <i>ratio</i>	<i>p-</i> <i>value</i>	
Const	2.93972	6.809	3.22e-011	** *
ACS	-0.622212	-3.841	0,0001	** *
ACM	-0.0238741	-1.023	0,3068	
ACI	3.59768	9.034	5.16e-018	** *
ACS*WBS	0.813757	8.681	7.55e-017	** *
ACM*WBS	0.00840169	0.3302	0.7414	
ACI*WBS	-4.50940	-9.786	1.32e-020	** *

Temuan dan Interpretasi

Setelah dilakukan pengujian hipotesis, didapatkan *R-Squared* sebesar 0,204604. Hal tersebut menunjukkan bahwa 20.46% faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian.

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*. Oleh karena itu **H1 ditolak**. Sedangkan variabel independensi komite audit memiliki hubungan negative signifikan

terhadap *financial distress* dalam penelitian ini, oleh karena itu **H2 diterima**. Hasil dari pengujian hipotesis frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, maka **H3 ditolak**. Variabel penerapan system *whistleblowing* terbukti memperkuat hubungan antara jumlah komite audit terhadap *financial distress*, maka **H4 diterima**. Variabel penerapan system *whistleblowing* tidak terbukti memperkuat hubungan antara frekuensi rapat komite audit dan independensi komite audit terhadap *financial distress*, maka **H4 ditolak**.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian ini, ukuran komite audit memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap *financial distress*, sehingga H1 dalam penelitian ini ditolak. Penelitian ini tidak sejalan dengan Nuresa & Hadiprajitno (2013), Setiyani (2014), dan Rahmat & Iskandar (2009) yang menyatakan ukuran komite audit tidak berelasi dengan *financial distress*. Salah satu syarat pembentukan komite audit di dalam suatu perusahaan menurut acuan dari Bapepam yaitu memiliki jumlah minimal 3 orang. Meskipun ada beberapa perusahaan yang memiliki 5 orang anggota, ternyata jumlah tersebut belum dapat memberikan kontribusi dan pengaruh untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan karena jumlah anggota yang ada hanya sebatas mengikuti aturan Bapepam. Syarat yang sudah terpenuhi tersebut ternyata tidak menjamin komite audit menjadi efektif dan menghindari terjadinya *financial distress* (Rahmat & Iskandar, 2009). Selain itu, wewenang dari komite audit hanya memberikan pendapat dan keputusan akhir tetap ada pada pimpinan perusahaan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.6, independensi komite audit memiliki hubungan yang signifikan dan memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress* sehingga H2 penelitian diterima dengan penjelasan jumlah komite audit independent meningkatkan Z-Score karena semakin besar Z-Score, maka semakin rendah *financial distress* dalam suatu

perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan Lu et al. (1992) yang menyatakan bahwa kemakmuran pemegang saham meningkat apabila komite audit didominasi oleh pihak luar, serta penelitian dari Anderson et al. (2003) yang menemukan bahwa semakin besar tingkat komite audit independen maka semakin tinggi pula tingkat keandalan laporan keuangan atau dengan kata lain, mekanisme pengawasan akan berjalan lebih independen dan bebas dari benturan kepentingan manajer, sehingga perusahaan tidak masuk ke dalam kondisi *financial distress*.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.6, frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Koordinasi yang kurang dan pertemuan komite audit yang jarang dihadiri oleh pihak manajemen, pihak auditor eksternal maupun pihak auditor internal diduga membuat komite audit kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan perusahaan. Frekuensi rapat yang lebih sering bisa juga diselenggarakan karena komite audit justru membahas masalah-masalah atau kesulitan yang muncul dalam perusahaan karena notulen rapat yang tidak dapat diketahui para pengguna laporan keuangan (Gunawijaya, 2015).

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* memperkuat hubungan antara karakteristik komite audit khususnya ukuran komite audit terhadap *financial distress*. Berdasarkan tabel 4.6, penerapan sistem *whistleblowing* terbukti memperkuat hubungan antara ukuran komite audit terhadap *financial distress*, sehingga hipotesis ini diterima. Penjelasan adalah *whistleblowing* dapat menjadi alat untuk membantu komite audit dalam memeriksa informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan, salah satunya yaitu informasi keuangan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Jika ukuran komite audit besar, maka komite audit akan semakin efektif untuk menangani masalah karena komite memiliki sumber daya yang memadai (Pembayun & Januarti, 2012). Dengan adanya sistem *whistleblowing* yang diterapkan, maka komite audit akan lebih bisa bekerja dengan

maksimal karena dapat mendeteksi secara cepat jika ada kecurangan yang dilakukan oleh anggota perusahaan, sehingga perusahaan tidak masuk ke dalam kondisi *financial distress*.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* memperkuat hubungan antara karakteristik komite audit khususnya pada independensi komite audit ditolak. Hal ini terjadi karena laporan yang masuk melalui sistem *whistleblowing* mengungkapkan siapa saja oknum yang terlibat dalam permasalahan di suatu perusahaan, serta berdasarkan pada penelitian sebelumnya, independensi komite audit memang terbukti dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, lamanya penugasan audit, serta besarnya fee audit (Ika & Satria, 2011). Jika pada hipotesis kedua menyatakan bahwa independensi komite audit terbukti berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, maka dengan adanya penerapan sistem *whistleblowing* inilah yang akhirnya mengungkapkan apakah komite audit benar-benar independen dalam menjalankan tugasnya atau tidak.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* dapat memperkuat hubungan antara karakteristik komite audit khususnya pada frekuensi rapat komite audit terhadap *financial distress* ditolak. Penjelasan adalah ketika sistem *whistleblowing* diterapkan, maka komite audit akan cenderung membahas masalah-masalah yang muncul, tidak fokus terhadap penyelesaian masalahnya. Efektivitas penerapan sistem *whistleblowing* dipengaruhi oleh 3 hal diantaranya, hal yang membuat karyawan memiliki niat untuk melaporkan, sikap perusahaan terhadap pembalasan yang dialami oleh pelapor *fraud*, dan adanya akses pelaporan pelanggaran ke luar perusahaan apabila respon yang diberikan hanya seadanya saja (KNKG, 2008). Dalam penelitian ini diduga anggota perusahaan tidak melapor ke sistem *whistleblowing* saat terjadi *fraud*. Sehingga saat komite audit mengadakan rapat, tidak membahas tentang laporan dari *whistleblowing* karena memang terlihat tidak ada kejanggalan yang terjadi di dalam perusahaan dan penerapan sistem

whistleblowing pun menjadi tidak berpengaruh apapun terhadap kondisi keuangan perusahaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik komite audit terhadap *financial distress* dengan penerapan sistem *whistleblowing* sebagai variabel moderasi. Sampel perusahaan yang digunakan berasal dari 90 perusahaan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) dan selama periode 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019. Jumlah sampel akhir yang digunakan adalah sebanyak 450 data. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*, (2) independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, (3) frekuensi rapat komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*, (4) penerapan sistem *whistleblowing* memperkuat jumlah komite audit terhadap *financial distress* (5) penerapan sistem *whistleblowing* memperlemah frekuensi rapat komite audit terhadap *financial distress*, (6) penerapan sistem *whistleblowing* memperlemah independensi komite audit terhadap *financial distress*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut adalah saran yang dapat diajukan kepada pihak perusahaan khususnya komite audit perusahaan. Komite audit harus semakin independent dan tidak terikat dengan kepentingan manapun agar tidak merugikan perusahaan yang menyebabkan terjadinya *financial distress*. Bagi pihak direksi, diharapkan untuk menelaah kembali fungsi dari komite audit dalam jumlah tertentu apakah sudah efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Kemudian, perlu diperiksa kembali apakah rapat yang diadakan sudah menghasilkan kemajuan dalam perusahaan atau penyelesaian masalah yang ada di perusahaan atau malah tidak menghasilkan solusi sama sekali yang pada akhirnya perusahaan tetap mengalami kondisi keuangan yang kurang

baik padahal sering mengadakan rapat. Untuk perusahaan diharapkan menerapkan sistem *whistleblowing* agar terhindar dari permasalahan keuangan. Jika sudah diterapkan, hasil dari pelaporan sistem *whistleblowing* harus dicek kembali apakah memang terbukti laporan tersebut akurat atau malah sebaliknya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini karakteristik komite audit yang digunakan tergolong sedikit, hanya tiga variabel diantaranya ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Peneliti selanjutnya juga bisa menggunakan karakteristik komite audit lain agar lebih bervariasi. Kemudian, uji R² yang hanya menghasilkan 0.20 atau 20% diartikan bahwa kemampuan menjelaskan variabel ini cukup rendah. Hal tersebut mengindikasikan banyak faktor lain di luar penelitian ini yang sebenarnya dapat berpengaruh lebih kuat. Untuk perhitungan penerapan sistem *whistleblowing* dalam penelitian ini menggunakan *dummy* yang mana bisa lebih baik jika menggunakan metode pengukuran lain seperti skala likert.

DAFTAR REFERENSI

- Ahern, K., & McDonald, S. (2002). The Beliefs of Nurses Who Were Involved in A Whistleblowing Event. *Journal of Advanced Nursing Vol. 38 No. 3*, 303-309.
- Ahmad, S. A., Yunos, R. M., Ahmad, R. A., & Sanusi, Z. M. (2014). Whistleblowing behaviour: The influence of ethical climates theory. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 164, 445-450.
- Ajzen, I. (2006). Constraining A Theory of Planned Behavior Questionnaire. 1-3
- Almilia, L. S., & Kristijadi. (2003). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 7 No. 2: 183-186.

- Andre, O. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage dalam Memprediksi Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, Vol. 1 No. 1*, 25-40.
- Anderson, R. C., et al. (2003). "Board Characteristics, Accounting Report Integrity, and The Cost of Debt". *Journal of Accounting and Economics, Vol. 37*, 315-342.
- Atmini, S., & Wuryana. (2005). Manfaat Laba dan Arus Kas untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress pada Perusahaan Textile Products yang Terdaftar di BEJ. *Seminar Nasional Akuntansi VIII*, 25-30.
- Elias, R. (2008). Auditing Students' Profession Their Relationship to Whistleblowing. *Managerial Auditing Journal* Vol.23, No. 3, 283-294.
- FCGI. (2002). *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Jilid I. Edisi ke-3*. Jakarta: FCGI.
- Gunawijaya, I. N. (2015). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Independensi Dewan Komisaris, Reputasi Auditor terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 14, No. 27*, 111-130.
- Jensen, M., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Magerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Vol. 3* , 305-360.
- Khan, M.A.B.M.K., Anuar, B.N., & Mahzan, N.D. (2014).The intervening effects of whistleblowing in reducing the risk of asset misappropriation. *Journal of Business and Economics, Vol. 5, No. 10*, 1929-1939.
- Lee, G., & Fargher, N. (2013). Companies' Use of Whistle-Blowing to Detect Fraud: An Examination of Corporate Whistle-Blowing Policies. *Journal of Business and Ethics, Vol. 114*, 283-295.
- Lu, Y. C., et al. (2008). "Corporate Governance, Quality of Financial Information, And Macroeconomic Variables on The Prediction Power of Financial Distress of Listed Companies in Taiwan". *SSRN Working Paper Series*.
- Mas'ud, I., & Srengga, R. M. (2012). Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol. 10 No. 2*, 139-154.
- McMullen, D. A., & Raghunandan, K. (1996). Enhancing Audit Committee Effectiveness. *Journal of Accountancy;New York Vol. 182 Iss. 2*, 79.
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). Characteristics of Organizational Climate and Perceived Wrong doing Associated with Whistle-Blowing Decisions. *Personnel Psychology Vol. 38*, 525-544.
- Mustapha, M., & Ahmad, A. C. (2011). Agency theory and Managerial Ownership: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal, Vol. 26 Iss 5*, 419-436.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistleblowing. *Journal of Business Ethics, Vol. 4, No. 1*, 1-16.
- Nuresa, A., & Hadiprajitno, B. (2013). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2 No. 2*, 1-10.
- Pembayun, A. G., & Januarti, I. (2012). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 1 No. 1*, 1-15.
- Platt, H., & M., B. Platt. (2002). Predicting Financial Distress. *Journal of Financial Service Professionals, Vol. 56*, 12-15.
- Rahmat, M. M., & Iskandar, T. M. (2009). Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non-distressed Companies. *Managerial Auditing Journal, Vol. 24, No. 7*, 624-638.
- Revitasari, Nurdin, F. T., & Azib. (2017).Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015. *Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3, No. 1*, 289-293.
- Saleh, N. M., Iskandar, T. M., & Rahmat, M. M.(2007). Audit committee characteristics and Earning Management: Evidence from Malaysia. *Emerald Vol. 15, No. 2*, 147 163.

- Setiyani, D. (2014). Determinasi Karakteristik Komite Audit dalam Memprediksi Kondisi Financial Distress Studi Empiris Perusahaan Sektor Jasa yang Terdaftar di BEI tahun 2010-2012. *Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3, Iss. 1*, 29-46.
- Soliman, M. M., & Ragab, A. A. (2014). Audit Committee Effectiveness, Audit Quality and Earning Managements: An Empirical Study of The Listed Companies in Egypt. *Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 5, No. 2*, 155-166.
- Utami, L., Handajani, L., & Hermanto. (2019). Efektivitas Komite Audit dan Audit Internal terhadap Kasus Kecurangan dengan Whistleblowing System sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 26, No. 2*, 1570-1600.
- Widarjo, W., & Setiawan, D. (2009). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kondisi Financial Distress Perusahaan Otomotif. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.11, No. 2*, 107-119.
- Zakaria, M. (2015). Antecedent Factors of Whistleblowing in Organizations. *Procedia Economics and Finance, Vol. 28*: 230-234.